

STRATEGI BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENGAMANAN DAN KESELAMATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

STRATEGY OF MARINE SECURITY AGENCY (BAKAMLA) IN SECURITY AND SAFETY IN INDONESIAN MARINE AREAS

Leo Rasiddin¹, Lukman Yudho Prakoso², Rudi Sutanto³

PRODI STRATEGI PERTAHANAN LAUT, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

(leorasiddin7@gmail.com, lukman.prakoso@outlook.com, rudi.sutanto071@gmail.com)

Abstrak-Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi geostrategic. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah yang sama banyaknya pula. Masalah yang timbul diantaranya adalah mengenai masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, maka Indonesia membentuk Bakamla. Untuk membahas tentang strategi dari badan keamanan laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia. Yuridis empiris dengan mencari tau secara spesifik kinerja dan cara Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Yang didapatkan setelah melakukan serangkaian penelitian. Bagian yang paling orisinal dalam suatu penelitian, tidak terkecuali dalam penulisan ini. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Pada penelitian ini adalah bakamla dalam menjaga wilayah perairan di Indonesia telah dan siap untuk mengatur strategi untuk mencegah kejahatan yang ada di wilayah perairan wilayah Indonesia. Sebagaimana kita tau bahwasannya Indonesia merupakan Negara kepulauan karena itu bakamla hadir dan siap bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan di Indonesia.

Kata Kunci : Badan Keamanan Laut, pengamanan wilayah, keselamatan wilayah, perairan Indonesia, tugas badan keamanan laut

Abstract-Indonesia is the largest archipelagic country in the world which has a very wide area. Indonesia is one of the largest archipelagic countries in Asia, even in the world. This is evidenced by the recorded number of islands in the territory of Indonesia, which reached 17,499 islands. Apart from being an archipelagic country, Indonesia also has unique marine characteristics which are used as international transportation routes that are supported by its geostrategic position. With the many advantages that Indonesia has, it will certainly be accompanied by the same number of problems. The problems that arise include security and safety issues in Indonesian waters. To realize security and safety in Indonesian waters, Indonesia formed Bakamla. The approach used in this research is empirical juridical. The

establishment of Bakamla in Indonesia serves as a security and safety guard in Indonesian waters. Therefore Bakamla exists and is ready to prepare a strategy for security and marine safety in Indonesian territory so that it is even more optimal in maintaining sea security and safety in Indonesian territory. The aim is to discuss the strategy of the maritime security agency (Bakamla) in maintaining the security and safety of waters in Indonesian territory. The empirical juridical method is to find out specifically the performance and method of Bakamla in maintaining the security and safety of waters in the territory of Indonesia which is then analyzed qualitatively. The results were obtained after conducting a series of studies. The results of the most original part of a study, are no exception in this writing. Law number 25 of 2014 in article 1 states that the strategy of the Indonesian Maritime Security Agency for 2020-2024, hereinafter referred to as the Indonesian Bakamla Strategic Plan 2020-2024, is a guideline in planning, implementing, and evaluating programs and activities carried out to realize the vision and the mission of the Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia. The conclusion of this research is Bakamla in protecting the territorial waters in Indonesia has and is ready to set a strategy to prevent crime in the territorial waters of Indonesia. As we know Indonesia is an archipelagic country, therefore Bakamla is present and ready to serve to maintain the security and safety of the territorial waters in Indonesian waters.

Keywords: Maritime Security Agency, territorial security, territorial security, Indonesian waters, duties of the marine security agency

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi geostrategic. (Bakamla, 2020)

Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional. Atas keuntungan itu dan dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah yang sama banyaknya pula. Masalah yang timbul diantaranya adalah mengenai masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia, maka Indonesia membentuk Bakamla. Bakamla merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia,

lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional maka Bakamla menggunakan nama *Indonesia Coast Guard* (ICG). Sering kali kita mendengar bahwasannya keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia masih kurang dan perlunya tindakan dan strategi pengamanan dan keselamatan yang tepat untuk wilayah perairan Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh bakamla di perairan wilayah Indonesia adalah penyelundupan, perbudakan, narkoba, ini merupakan masalah ancaman yang perlu di tindak lanjuti dan yang paling kerap terjadi adalah penangkapan ikan secara illegal. Fenomena yang terjadi di wilayah perairan wilayah Indonesia diantaranya ada Pencemaran laut, laut tercemar akibat limbah industri dan rumah tangga yang terbawa aliran air dari daratan. Dan juga adanya Penyelundupan di perbatasan laut, banyak terjadi penyelundupan di wilayah perairan laut yang dekat dengan perbatasan, Penyelundupan masuk zat berbahaya seperti narkoba ini dapat merusak generasi bangsa. Sementara penyelundupan hewan langka dapat mengancam keanekaragaman hayati. (A., 2020)

Bakamla merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional maka Bakamla menggunakan nama *Indonesia Coast Guard* (ICG). Dalam pembentukan Bakamla tidaklah mudah untuk dilakukan, mengingat telah terdapatnya banyak instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut berdasarkan Undang-Undang nya masing-masing. Oleh sebab itu dalam menjaga stabilitas kedaulatan laut NKRI pemerintah membuat peraturan perundang-undangan keamanan laut yang dijalankan oleh lembaga terkait, yaitu Bakamla. Dasar hukum dari Bakamla adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla. Dengan adanya sistem keamanan laut yang tangguh melalui penguatan organisasi Bakamla yang selalu siap menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia.

Inti dari Permasalahan ini adalah di perairan Indonesia perlunya diawasi dan

diantisipasi oleh badan keamanan laut (Bakamla, 2020) dari kejahatan-kejahatan yang ada di perairan laut Indonesia yang sering kali di hadapi oleh Bakamla, kejahatan itu diantaranya adalah penyelundupan, perbudakan, narkoba, yang mana mesti menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang strategi dari badan keamanan laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia yang dimana kejahatan yang terus menerus datang dan perlunya disini dilakukan strategi keamanan dan keselamatan yang lebih lagi dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. (Kepala Badan Keamanan RI, 2020)

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan mencari tau secara spesifik kinerja dan cara Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Tugas, badan keamanan laut yaitu :

1. Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi.
2. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
3. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
6. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
7. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

8. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

1. Melakukan pengejaran seketika.
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain sesuai dengan tugas dan wewenang jabatan penegakan hukum tersebut di atas, kemudian diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden/Peppres nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, (Kepala Badan Keamanan RI, 2020), kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan keamanan dan penegakkan hukum

menjadi salah satu bagian tugas dan fungsi dari dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla, 2020), sehingga diperlukan strategi di laut terutama dengan terbentuknya organisasi BAKAMLA mengenai tugas, fungsi dan wewenang sebagai aparaturnya penegak hukum di laut.

Setelah mengetahui sedikit mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla, maka dapat dilihat mengenai kelebihan serta kelemahan dari instansi tersebut, diantaranya adalah :

1. Kelemahan

1. Tidak disebutkan secara jelas mengenai kategori dari keselamatan dan keamanan; Bakamla tidak memiliki peran sebagai penyidik. Sehingga apabila tersangka melakukan praperadilan, akan sangat mungkin kasus yang ditangani Bakamla.

2. Kelebihan

- a. Kewenangannya mencakup wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. Sudah menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi

dini (*Early Warning System*) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAKAMLA merupakan Lembaga Negara Non Kementerian yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di laut dan dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA, dapat diartikan bahwa ada legitimasi hukum BAKAMLA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di laut. BAKAMLA dalam menjalankan fungsinya salah satunya memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, kaitannya dengan kewenangan penegakan hukum tersebut yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal yang telah melakukan pelanggaran hukum di laut tersebut kepada instansi

penyidik terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. (Kepala Badan Keamanan RI, 2020)

Bermacam macam bentuk ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi dilaut yang perlu diwaspadai antara lain ancaman kekerasan yang menggunakan kekuatan bersenjata dengan terorganisir seperti terorisme, pembajakan, perampokan dan sabotase. Ada juga ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik dalam sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan pergelaran kekuatan militer. Selain itu, ancaman hukum yang menyangkut dengan tidak dipatuhinya hukum baik dari hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan penyelundupan. Sementara ancaman navigasi, menyangkut ancaman yang ditimbulkan dari geografi maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakn pelayaran. "Oleh karena itu diperlukan tindakan yang seimbang dan harus dimiliki Indonesia sebagai sebuah upaya preventif maupun represif,". Dari

berbagai jenis ancaman tersebut, yang tengah menjadi sorotan adalah *national resource turbulation* atau ancaman terhadap sumber daya laut. Ancaman ini berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan sumber daya alam. Ancaman juga bisa datang dari pihak luar seperti tindakan *illegal fishing* ataupun *illegal logging* dan beberapa tindak penyelundupan lainnya.

Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan wilayah NKRI, diperlukan alat pertahanan dan keamanan Negara. Ancaman terhadap tindakan kekerasan, penyelundupan, perbudakan, narkoba, kecelakaan di laut, pencemaran di laut/perusakan sumber daya laut. (Ronald, 2020).

Adanya Ancaman terhadap tindak kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan baik personel maupun material serta ancaman terhadap negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman pembajakan, ancaman terhadap adanya perompakan.

Adanya ancaman terhadap penyeludupan, yaitu perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum. Bentuk penyelundupan dapat dilakukan pada bangunan, penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu negara. Suatu kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara.

Adanya ancaman terhadap perbudakan, yaitu segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikendalikan disebut dengan budak.

Adanya ancaman terhadap narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adanya ancaman terhadap pencemaran di laut/perusakan sumber daya laut, yaitu yakni berupa pencemaran

laut dan perusakan ekosistem laut, serta adanya konflik pengelolaan sumber daya laut, sehingga memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan dan sengketa perbatasan. (Kepala Badan Keamanan RI, 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan secara jelas mengenai kewenangan dari Bakamla. Kewenangan dari Bakamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan dari Bakamla diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh Bakamla dengan tugas sebagai berikut:

1. Tugas
 - a. Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
2. Fungsi
 - a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
 - b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
 - c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
 - d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
 - e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
 - f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan hal yang didapatkan setelah melakukan serangkaian penelitian. Hasil merupakan bagian yang paling orisinil dalam suatu penelitian, tidak terkecuali dalam penulisan ini. Negara Indonesia terdiri kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Bakamla dalam menghadapi ancaman kejahatan di perairan wilayah Indonesia sangatlah susah. Dengan didirikannya instansi bakamla hadir dan siap menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia meskipun itu sangatlah susah dikarenakan banyaknya ancaman dan masalah di perairan di wilayah Indonesia ini yang selalu dan siap untuk datang.

Seperti yang kita ketahui kejahatan, ancaman yang selalu terjadi dan menyulitkan bakamla di perairan wilayah

Indonesia adalah *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking/* Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut. Melalui Bakamla RI hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Melalui tugasnya, Bakamla turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia aman dan selamat dari kejahatan dan ancaman di perairan wilayah Indonesia ini merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritime. (HUMAS FHUI, 2018)

Tentu dalam menjaga keamanan dan keselamatan bukan hanya fungsi dan tugas serta wewenang saja yang mesti selalu di perhatikan dan di tegakkan

dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia, Bakamla perlu membuat mengatur strategi untuk menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia dan dari itu bakamla sudah menyiapkan dan mengatur rencana strategis untuk menjaga kemanan dan keselamatan perairan Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat rencana strategis pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Bakamla RI berkomitmen untuk membangun prestasi aksi dan prestasi hasil melalui tugas dan

fungsinya yang diamankan oleh peraturan perundangan. Rencana strategis merupakan jabaran visi dan misi Bakamla RI 2020-2024 yang menjadi acuan segenap acuan kerja di lingkungan Bakamla RI. Tugas untuk membangun sektor keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia kedepan adalah tugas yang siap untuk dilaksanakan oleh Bakamla RI (Bakamla, 2020)

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan serta permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Bakamla RI hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas dan fungsi bakamla juga dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah

Indonesia juga membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Bakamla yang menerapkan dan menyiapkan rencana strategi untuk lebih menjaga dan mengoptimalkan dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan wilayah Indonesia dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2014 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

mengamatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat rencana strategis pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Bakamla RI berkomitmen untuk membangun prestasi aksi dan prestasi hasil melalui tugas dan fungsinya yang diamankan oleh peraturan perundangan. Rencana strategis merupakan jabaran visi dan misi Bakamla RI 2020-2024 yang menjadi acuan segenap acuan kerja di lingkungan Bakamla RI. Tugas untuk membangun sektor keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia kedepan adalah tugas yang siap untuk dilaksanakan oleh Bakamla RI.

3. Manfaat dari pembentukan Bakamla yang dapat dirasakan oleh Negara Indonesia adalah dalam ketentuan Bakamla telah mengatur mengenai sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (*Early Warning System*) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geologis dan

klimatologis termasuk dalam wilayah yang rawan bencana.

Saran

Perlunya kerjasama dari sistem pengawasan dan pengendalian keamanan maritim yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* dengan Pusat Komando Pengendalian BAKAMALA RI, sehingga jangkauan pengawasan menjadi lebih luas dan dapat saling menutupi. Sekaligus pula dapat mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengendalian laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

B. Apabila dilihat dari sisi Instansi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI sudah saatnya menatap kedepan dalam memaksimalkan manajemen keamanan maritim agar dapat meminimalis kerugian yang berkelanjutan akibat penyelenggaraan penegakan hukum di laut. Hal tersebut tidak terlepas bagaimana peran negara dalam mewilayah penyelenggaraan pengendalian laut baik oleh militer ataupun sipil non-militer dalam aspek penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

Daftar Pustaka

Andriansyah, A. (2020, Juni 05). *Jenis ancaman di wilayah perairan laut Indonesia*. Retrieved from

voaindonesia.com:

<https://www.voaindonesia.com/author/anugrah-andriansyah/2020/>

BAKAMLA. (2020, Juni 16). *Rencana Strategis Bakamla 2020 - 2024*. Retrieved from Bakamla: http://bakamla.go.id/profile/annual_strategic_plan

HUMAS FHUI. (2018, April 12). *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*. Retrieved from Law.ui.ac.id: <https://law.ui.ac.id/V3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>

Kemendagri. (2012, Juli 13). *pulau di indonesia*. Retrieved from Kemendagri: <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau>

Kepala Badan Keamanan RI. (2020). *Rencana Strategis Bakamla. badan keamanan laut: https://bakamla.go.id*.

Ronald. (2020, Agustus 12). *Bermacam - macam bentuk ancaman di laut*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/ronald/2020>